

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(STUDI DI DESA NEGERI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)**

(Skripsi)

Oleh :

**SOFIA TRI MULYA
NPM 1846021003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DI DESA NEGRI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

SOFIA TRI MULYA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi BPD sebenarnya menjadi lebih strategis dengan membangun sistem pemerintahan desa musyawarah desa menjadi forum untuk mengambil keputusan-keputusan strategi dan di peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsinya seperti fungsi legilasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan tetapi anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat desa masih memiliki tingkat kapabilitas yang kurang seperti terbatasnya pendidikan, pengalaman, dan kemampuan khusus hal tersebut menyebabkan BPD belum maksimal dalam menjalankan perannya serta kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengetahui dan menganalisis peran apa saja dari Dinas PMDT Provinsi Lampung untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas kemampuan anggota BPD.

Jenis Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi, Editing, Interpretasi data. Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa peranan pemberdayaan masyarakat, desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada tiga tahap yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas sistem dalam 3 tahap ini masing-masing berperan untuk membangun kemampuan anggota BPD dalam meningkatkan kapasitas dan sudah berjalan dengan baik namun terdapat faktor penghambat yaitu masih kurangnya sebuah pelatihan dan pemahaman kepada BPD karena minim ruang dalam berdiskusi di masa pandemi sehingga BPD masih kurang paham fungsi dan tupoksinya.

Kata Kunci : *Peranan Dinas Pmdt, Peningkatn kapasitas badan permusyawaratan Desa (BPD)*

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF VILLAGE COMMUNITY
EMPOWERMENT AND TRANSMIGRATION OF LAMPUNG PROVINCE
IN INCREASING THE CAPACITY OF MEMBERS OF THE VILLAGE
CONSULTANCY AGENCY
(STUDY IN NEGERI SAKTI VILLAGE, PESAWARAN REGENCY)**

By

Sofia Tri Mulya

The Village Consultative Body (BPD) as a partner of the Village Government has a major function in protecting customs, making village regulations with the village head. In Law 6 of 2014 concerning villages, the BPD's position has actually become more strategic by building a village government system into a forum for making decisions by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body to assign a legal number to BPD as an institution in the village that has a function such as the legislative function, budget function, supervisory function but members of the BPD as representatives of the village community still have a low level of capability such as limited education, experience, and special abilities, this causes the BPD to not be optimal in carrying out and lack of understanding of the main tasks and functions. to find out how the role of the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office in Increasing the Capacity of the Village Consultative Body (BPD), to find out and analyze the roles of the Lampung Province PMDT Office to form and increase capacity BPD members.

The type of research used is qualitative research with data collection methods through observation studies, interviews and documentation, editing, data interpretation. The results of the study show that the role of community, village and transmigration empowerment in Lampung Province in increasing the capacity of members of the Village Consultative Body (BPD) has three stages, namely increasing individual capacity, increasing organizational capacity, increasing system capacity. BPD members in increasing capacity and it has been going well, but there are inhibiting factors, namely the lack of training and understanding for BPD because there is minimal space for discussion during the pandemic so that BPD still does not understand its functions and main tasks.

Keywords: The Role of the Pmdt Office, Capacity Building for the Village Consultative Body (BPD)

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN
KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI
DI DESA NEGERI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)**

**Oleh
SOFIA TRI MULYA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DI DESA
NEGERI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)**

Nama : **Sofia Tri Mulya**

No. Pokok Mahasiswa : 1846021003

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos.,M.IP.

NIP. 19680112 199802 1 001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Harjo', with a horizontal line underneath.

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Sigit Krisbintoro', with a horizontal line underneath.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 19611218 198902 1 001

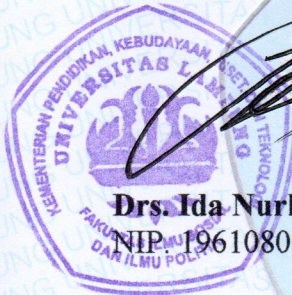
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos.,M.IP.**

Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Mei 2022**

Two handwritten signatures in black ink are present. The first signature is for Budi Harjo, and the second is for Aman Toto Dwijono. Dotted lines are placed below each signature to indicate the corresponding names in the text.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sofia Tri Mulya
NPM. 1846021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 5 Juli 1999, merupakan putri dari Bapak Naza Irsan dan Ibu Zakiah, anak ketiga dari tiga bersaudara serta mempunyai Kakak Perempuan bernama Firza Novita Sari dan abang bernama Yozi Suhendra. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Diniyyah Putri Lampung Kabupaten Pesawaran.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Segala Mider. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Perintis 2 Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Bukit Kemiling Permai (BKP) yang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Paralel dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis pernah ikut dalam organisasi kampus yaitu sebagai anggota biro Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2019.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Lingkungan Griya Sejahtera Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan
seseorang, kadang manusia punya mulut tapi
belum tentu punya pikiran.”
(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan
menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia
selalu senang.”
(Imam Syafi’i)

“Kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau
ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada
untuk di keluhkan”
(Sofia Tri Mulya)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

*"Ayah dan Mamaku
Tercinta"
dan
"Abang serta uwoku
Tercinta"*

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas
Lampung**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DI DESA NEGERI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat memperhatikan setiap kesalahan skripsi saya agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang

membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.

5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono M.H. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis sekaligus sebagai dosen Pa penulis . Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Naza Irsan dan Ibu Zakiah. Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku semoga ayah dan mam selalu diberikan kesehatan.
8. Untuk abangku Yozi suhendra terima kasih selalu mendukung, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu menyemangatkan untuk menyelesaikan skripsi sampai detik ini, untuk abangku semoga selalu sehat dan bahagia semangat untuk kerjanya dan jaga kesehatan.
9. Untuk uwo ku Firza Novita Sari terima kasih selalu manjadi kakak yang bijaksana yang baik dan selalu menolongku semoga uwo selalu sehat dan banyak rezekinya amiin.
10. Untuk keponakan ku Muhammad Faizar alif terimakasih telah hadir di dunia tante sayang banget sama faiz semoga faiz tumbuh menjadi anak yang soleh anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu saya nenek,datuk,tante dan om amiin.

11. Seluruh informan yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Kasi Bidang 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Ketua BPD Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Sahabatku Bella Lesta Nurul Utama, Hestiantina Efendi. Terima kasih karena telah menjadi keluarga, teman curhat dan segalanya terima kasih atas bantuannya, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.
13. Sahabatku Clarisa Milenia Ramadhani Terima kasih karena telah menjadi teman curhat, saudara, bahkan teman berbagi kebahagiaan dan suka duka makasih sudah mau di repotkan untuk selalu mendengarkan keluhan dan kesedihan makasih udah mau menguatkan dan selalu meyakinkan setiap langkah yang kita pilih itu tidak pernah salah, sukses untuk kerjanya sehat terus dan selalu bahagia .
14. Untuk sahabat saya Fitriana Syahwa, Nurothul Azizah, Fauzan Isniah Puspita, Ayu Safitri, Ayu Nandini, dan Mylina Ajeng Sevira terimakasih untuk waktu yang singkatnya di perkuliahan terima kasih atas kabaikan kalian, terima kasih untuk pengalaman perkuliahan yang sangat indah, kalian akan tetap menjadi sahabat saya dimana pun kalian berada semoga kita semua dapat berkumpul kembali dengan keadaan yang sehat dan selalu bahagia.
15. Untuk Sahabat saya Fitriana Syahwa, Nurothul Azizah, Fauzan Isniah Puspita terimakasih telah menjadi sahabat yang baik untuk selama ini, telah menjadi partner main kemana pun itu, telah memberikan canda tawa dan lainnya semoga kita selalu menjadi sahabat untuk selamanya dan semoga kita akan selalu sukses untuk kedepannya amin.

16. Terima kasih kepada Chelsea Kesadiana C dan Ranti Apriliani yang telah bersamaan dalam mengurus skripsi terima kasih udah selalu ingin di repotkan terimakasih sudah ingin berbagi pengalaman, cerita dan lain lain semoga kita selalu sukses untuk setiap langkah yang kita jalani.
17. Untuk Sry Apriani Ginting, Terima kasih sudah membantu saya dalam hal mengurus berkas, Terima kasih sudah mau direpotkan oleh saya yang banyak tanya tentang berkas berkas yang harus diurus. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu dan semoga kita bertemu lagi dan sukses dengan impian kita masing-masing.
18. Teman – teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Tania, Andi, Anjas, Ferdi, Yani dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan doanya. Semoga kita senantiasa di berikan kesehatan agar dapat mewujudkan cita – cita yang di impikan.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja dan yang terhormat Drs. Dorda M.M. kbid bidang perekonomian yang sangat baik terima kasih bapak sudah memberikan banyak pengalaman yang besar terimakasih bapak selalu memberikan motivasi dan terima kasih untuk kasih sayang bapak terhadap saya selaku Mahasiswa magang semoga bapak selalu sehat dan kebaiakan yang bapak berikan bernilai pahala dari allah SWT
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih,

semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Mei 2022

Sofia Tri Mulya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penelitian Tedahulu Yang Relevan.....	5
1.3 Identifikasi Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan.....	13
2.2 Peningkatan Kapasitas	16
2.2.1 Peningkatan.....	16
2.2.2 Kapasitas	17
2.2.3 Peningkatan Kapasitas	18
2.2.4 Jenis-jenis Peningkatan Kapasitas.....	20
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	24
2.3.1 Tugas Badan Permusyawaratan Desa	26
2.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	27
2.3.3 Hak dan Badan Permusyawaratan Desa	27
2.3.4 Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	27
2.3.5 Kerangka Pemikiran	28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Pengolahan Data	37
3.8 Teknik Analisis Data.....	38

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Dinas PMDT Provinsi Lampung.....	41
4.1.1 Sejarah Dinas PMDT Provinsi Lampung	41
4.1.2 Visi dan Misi Dinas PMDT Provinsi Lampung.....	42
4.1.3 Alamat Dinas PMDT Provinsi Lampung.....	43
4.1.4 Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung.....	44
4.2 Gambaran Umum Desa Negeri Sakti.....	49
4.2.1 Sejarah Desa Negeri Sakti	49
4.2.2 Data Umum Desa Negeri Sakti.....	50
4.2.3 Kelembagaan Desa Negeri Sakti	54
4.2.4 Keamanan dan Ketertiban Desa Negeri Sakti.....	55
4.2.5 Potensi Sumber SDA Desa Negeri Sakti	55

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	60
5.1.1 Indikator Peningkatan Individu.....	60
5.1.2 Indikator Peningkatan Organisasi.....	65
5.1.3 Indikator Peningkatan Sistem	72
5.2 Pembahasan.....	80
5.2.1 Indikator Peningkatan Individu.....	80
5.2.2 Indikator Peningkatan Organisasi.....	84
5.2.3 Indikator Peningkatan Sistem	88

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan90
6.2 Saran91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabe 1. Penelitian Terdahulu	6
2. Tabel 2. Nama Informan	35
3. Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung	45
4. Tabel 4. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung	46
5. Tabel 5. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung	47
6. Tabel 6. Batas Wilayah Negeri Sakti	55
7. Tabel 7. Jumlah Penduduk Negeri Sakti	56
8. Tabel 8. Usia Negeri Sakti	56
9. Tabel 9. Pendidikan Negeri Sakti.....	57
10. Tabel 10. Mata Pencaharian Pokok Negeri Sakti.....	58
11. Tabel 11.Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD	58
12. Tabel 12 Triangulasi Data Penelitian	75

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Pikir	30
2. Gambar Lokasi Dinas PMD Provinsi Lampung	44
3. Gambar pelatihan pendampingan lokal desa	62
4. Gambar surat acara forum diskusi (FKBPD).....	64
5. Gambar Peraturan Gubernur	69
6. Gambar Permendagri	71

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebuah komponen terpenting dalam sebuah pemerintahan sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara langsung. Desa sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam desa sangat berperan penting dalam berjalanya roda kehidupan di masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama. Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 Tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi BPD sebenarnya menjadi lebih strategis dengan bangunan sistem pemerintahan desa dimana musyawarah desa menjadi forum untuk mengambil keputusan-keputusan strategi. BPD sebagai penyelenggaraan Musyawarah desa sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam mendorong proses pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun

2016 tentang badan permusyawaratan desa memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

BPD dalam penyelenggaraan desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu :

1. Fungsi legislasi, pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Fungsi anggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu BPD mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan atau ketentuan hukum lainnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pendidikan, dan kemampuan khusus.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan pemerintah Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan yang di ambil sesuai dengan

keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam konteks inilah, sehingga dianggap sangat penting untuk segera membekali para pimpinan dan anggota BPD dengan berbagai kemampuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebab keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tingkat desa nantinya akan turut di tentukan oleh peran aktif dan kompetensi para anggota BPD (Kompasiana

Dan fakta di lapangan banyak menunjukkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa memiliki tingkat kapabilitas yang kurang mumpuni seperti terbatasnya tingkat pendidikan, pengalaman, dan kemampuan khusus, hal tersebut menyebabkan anggota BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa belum maksimal dalam menjalankan perannya serta kurang memahami tugas pokok dan fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat desa. Dampak dari kurangnya peranan anggota BPD di tengah masyarakat menyebabkan aspirasi masyarakat kurang diperhatikan serta kurang maksimalnya pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh pihak eksekutif desa.

Kurangnya kapabilitas anggota BPD dalam pemerintahan desa juga terjadi di berbagai desa di Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan lembaga desa dan aparatur desa menyebutkan bahwa peran anggota BPD di Provinsi Lampung kurang maksimal dikarenakan kurangnya kapabilitas yang dimiliki oleh anggota BPD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dinas PMDT Provisni Lampung, peran BPD sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat sekaligus badan yang menjadi *check and balance* terhadap kebijakan kepala desa masih di katakan memang sebagian besar BPD di Provinsi Lampung memang belum maksimal dan belum memberikan dampak yang signifikan di dalam masyarakat. Kurangnya peran BPD tersebut dikarenakan anggota yang tergabung dalam BPD desa kurang memahami posisi mereka di desa sebagai pemegang aspirasi masyarakat desa, kurang memahami tugas pokok

dan fungsi BPD sebagai bagian dari kelembagaan desa dan kurangnya pengetahuan dalam memahami tujuan BPD di dalam kelembagaan desa, Latar belakang kurangnya anggota BPD dalam memahami posisi mereka di dalam kelembagaan desa tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kapabilitas dan pendidikan formal yang kurang mumpuni sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan fungsi-fungsi dalam membantu kepala desa untuk proses pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat desa dan mengatasi permasalahan yang ada tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kapabilitas anggota BPD salah satunya melalui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) melalui bidang desa dan kelurahan seksi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur, telah melakukan beberapa upaya dalam hal peningkatan kapabilitas aparatur desa salah satu sasarannya adalah anggota BPD yaitu :

1. Melaksanakan pendayagunaan aparatur desa/kelurahan
2. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan desa
3. Meningkatkan Kapasitas aparatur desa dan Kelurahan

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini diperlukan sebagai referensi dan acuan peneliti agar mempermudah dalam melihat maupun mengamati, menambah kajian tentang bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran). Adapun penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahufn Penelitian	Tahun	Jenis	Judul Skripsi
1	Sri Hartina Alwi	2019	Skripsi	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Kabupaten Takalar
2	Lilis Dwiranti	2020	Skripsi	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
3	Miftahul Huda	2019	Skripsi	Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan desa di desa kedungpilang kec. Wonosegoro kab.boyolali ditinjau dari UU No.6 tahun 2014 tentang desa
4	Nur Laila Istiqomah	2020	Skripsi	Peran Badan

				Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Periode 2018
--	--	--	--	---

(Sumber : Data diolah peneliti)

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Peneliti mengambil penelitian sebelumnya seperti tersebut dengan paparan seperti di bawah ini :

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan alokasi dana desa di desa Patani Kabupaten Takalar yang berfokus pada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai peningkatan kapasitas BPD. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan yaitu orang-orang yang dianggap . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara secara mendalam dan dokumentasi di lokasi penelitian. Adapun hasil penelitian dari peningkatan kapasitas yaitu bagaimana cara perekrutan anggota BPD yang dipilih melalui musyawarah mufakat, pembagian struktur kerja oleh kepala desa, Adapun pengawasan yang digunakan BPD yaitu Pengawasan langsung berupa kegiatan BPD yang

terjun langsung dimasyarakat di setiap dusun yang ada di desa Patani untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Serta pengawasan tidak langsung yaitu dalam menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis mengenai rincian kegiatan maupun dana yang digunakan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Lilis Dwiranti yang berjudul peranan badan apaermusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BPD dalam tahap perencanaan pembangunan desa di desa poloweli kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan metode yang digunakan yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ke kantor desa polewali. Hasil Penelitian ini yaitu bahwa peranan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana faktor pendukung terealisasinya peranan BPD dalam perencanaan pembangunan di desa polewali kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai sudah berjalan baik dan efektif
3. Penelitian selanjutnya di buat oleh Miftahul Huda dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan desa di desa kedungpilang kec. Wonosegoro kab. boyolali ditinjau dari UU No.6 tahun 2014 tentang desa skripsi ini menjleskan tentang permasalahan yaitu bagaimana peran pelaksanaan pengawasan BPD terhadap bidang-bidang pemerintahan di desa di Desa Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BP.

Untuk menjawab permasalahan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dokumentasi dan studi pustaka data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui data mengenai peran BPD. emuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama peran pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap bidang-bidang Pemerintahan Desa di Desa

Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali meliputi pengawasan pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kedungpilang, pengawasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes, pengawasan terhadap kelembagaan desa di Desa Kedungpilang, pengawasan terhadap keuangan Desa Kedungpilang, dan pengawasan pengelolaan aset Desa Kedungpilang, kedua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD di Desa Kedungpilang Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya yaitu untuk mengabdikan atau memajukan dukuh dan hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan Prasarana, serta kurangnya SDM yang mengisi anggota BPD, ketiga peran pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa oleh BPD di Desa Kedungpilang dalam pemenuhan hak, kewajiban, larangan, fungsi dan wewenang anggota BPD serta menyampaikan laporan setiap akhir tahun, yang semuanya sudah dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan pasal 54, 55, 61, 62, 63 dan 27 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Laila Istiqomah yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Periode 2018 Dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera. Mulai awal tahun 2015 desa telah menerima dana yang bersumber dari APBN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur dana desa untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Mengingat jumlah dana desa yang diterima desa setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup banyak maka diperlukan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) untuk mengawasi penggunaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dari awal sampai akhir agar tidak terjadi penyelewengan. Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan tentang beberapa masalah pokok yaitu bagaimana transparansi pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, untuk menjawab permasalahan pokok di atas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research) yang berfungsi untuk mengetahui praktik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Daseh kecamatan Pakis apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama transparansi pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang meliputi, menyampaikan kepada masyarakat dana desa yang diterima di musyawarah desa juga disampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang akan dibangun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pembuatan laporan online yang ditujukan langsung kepada pusat, pembuatan laporan dalam bentuk gambar yang ditempel pada papan pengumuman desa, serta pembuatan laporan dalam bentuk buku untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Kedua peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanyakan langsung berapa dana desa yang diterima serta digunakan untuk apa saja dana desa tersebut, mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa bersama kepala desa, menerima laporan keuangan setiap tahunnya dari pemerintah desa.

Berdasarkan Kajian di atas dapat di tarik Kesimpulan bahwa kajian yang digunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan Kajian tersebut adalah sama sama meneliti tentang peran dan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan untuk perbedaannya adalah penelitian berada di Provinsi Lampung dan Di Desa Negeri Sakti yang lebih memfokuskan kepada peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk Meningkatkan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka, peneliti tertarik untuk meneliti “**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas anggota BPD dalam hal pelatihan dan pengembangan dalam kemampuan khusus sehingga anggota BPD tidak memahami terkait tuntutan dan fungsinya di dalam kelembagaan desa.
2. Masih kurangnya peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam membentuk kemampuan para anggota BPD dalam hal peningkatan kapasitasnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimanakah Peran Dinas Pemberdayaan Desa Dan

Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan ;

1. Ingin mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam meningkatkan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisa Peran apa saja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk meningkatkan kapasitas BPD.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi Ilmu dikalangan masyarakat tentang peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam keterbatasnya hal pendidikan maupun kemampuan khusus terkait tuntutan dan fungsinya dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan agar dikembangkan oleh peneliti dengan bahasan serupa yang akan di lakukan selanjutnya.

2. Manfaat Paraktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berkecimpung dalam ranah bahasan penelitian, dengan adanya penelitan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang sudah berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam prioritas peningkatan BPD

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai berikut: “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1173).

Menurut (Soejono Soekanto, 2012:212), dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut teori (Narwoko dan Suryanto, 2006:160) yang mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha, 2012:10).

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut.

Peran-peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi terbagi atas tiga menurut Mintzberg (Siswanto, Miftah Thoha, 2012:21 dan 12) :

1. Peran Antarpribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman

sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena :
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah didefinisikan dengan jelas. Ada lima aspek penting dari peran, yaitu :

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut soerjono soekanto (2013:213) dalam (Lilis Dwiranti,2020) peranan mencangkup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, (Siswanto, 2012:21)

2.2 Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

2.2.1 Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, organisasi, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan

kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya (Adi S. : 2003). Menurut Sugono (2008) dalam (Sri Hartina alwi 2019) mendefinisikan peningkatan sebagai proses, pembuatan, cara meningkatkan. Sejalan dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa peningkatan adalah proses pembuatan, cara meningkatkan usaha dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peningkatan adalah suatu proses perubahan meningkat yang berarti proses perubahan menjadi lebih baik. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

2.2.2 Kapasitas

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (*JICA, 2004*). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Kebanyakan literatur mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu. Kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara

perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan. Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar good governance itu sendiri, yaitu:

- 1) Masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri
- 2) Pemerintah, untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.
- 3) Swasta dan Kelompok Peduli Lain, upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Siapapun dapat melaksanakan upaya peningkatan kapasitas kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik itu individu, kelompok, organisasi formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang persyaratannya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.3 Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud

dengan peningkatan kapasitas. Setiap defenisi menurut para ahli memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian peningkatan kapasitas menurut para ahli. Peningkatan Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuantujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001). Sedangkan menurut pendapat Marison (2001) bahwa Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian inividu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Sejalan dengan pendapat di atas, peningkatan kapasitas sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk: menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasikan strategistrategi untuk mengatasi masalah, isu dan peluang tersebut dan memanfaatkan peluang yang relevan; merancang sebuah rencana aksi, strategi mengumpulkan dan menggunakan secara efektif dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut; serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

2.2.4 Jenis-Jenis Peningkatan Kapasitas

Selain defenisi dan penjelasan tersebut, peningkatan kapasitas juga memiliki tingkatan dalam upaya pengembangan kapasitas yang harus dapat dilaksanakan secara efektif serta berkesinambungan pada 3 tingkatan (Soeprapto, 2010) dalam (Sri Hartina Alwi, 2019) , sebagai berikut: pengertiannya, jenisnya, caranya dan tujuannya :

1. Peningkatan Kapasitas Individu

Kapasitas individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Pengembangan kapasitas individu secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai 12 macam metode, baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya. Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, dimana sebuah performa anggota BPD akan sangat mempengaruhi operasional pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan pengembangan kapasitas yang efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung peningkatan kapasitas individu secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pelatihan berarti perubahan sistematis dari knowledge (ilmu pengetahuan), skill (keterampilan), attitude (sikap) dan behavior (tingkah laku) yang terus mengalami peningkatan dan dimiliki oleh setiap anggota BPD. Dimana pelatihan ini dapat mewujudkan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam memenuhi standar SDM yang diinginkan.
2. Pengembangan Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena SDM sangat berpengaruh dengan performa sebuah perusahaan. Pengembangan yang dimaksud adalah sebuah usaha

dalam peningkatan kapasitas personal individu dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumberdaya manusia adalah semua orang baik pimpinan, pegawai maupun perangkat 13 desa yang tergabung dalam suatu organisasi dengan perannya dalam mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

3. Lingkaran belajar Forum grup discussion, rapat, maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pekerjaan. Dimana lingkaran belajar ini menuntut pegawai untuk menghadapi berbagai resiko permasalahan yang kemungkinan terjadi. Disini akan terbentuk SDM yang memiliki karakter bijak dalam menyikapi sesuatu. Sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan terkait. Strategi penerapan pengembangan kapasitas individu yaitu melalui diklat, pemberian upah/gaji, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja serta sistem rekrutmen yang tepat dan transparan agar dapat meningkatkan tenaga teknis yang professional.

Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas individu adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep dan metode administrasi dan pengetahuan diri.
2. Kemampuan yang mencakup: manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, penggerak/pengorganisasian, evaluasi atau pengendalian, menangani konflik, komunikasi dan pembelajaran.
3. Minat yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, norma dan etika.

2. Peningkatan Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi meliputi sumber daya, ketata laksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Pengembangan kapasitas organisasi secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan jaringan organisasi. Dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam pengembangan kapasitas meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan serta jaringan organisasi yang ada. Strategi penerapan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat dilakukan adalah melalui penataan struktur organisasi pemerintah yang tepat melalui spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintah, membenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja, penguatan dan pematapan metode pengalokasian anggaran sesuai visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan sarana dan sarana sesuai standar yang ditetapkan serta penyedia standar operasi prosedur kerja dan penerapan metode modern berbasis IPTEK. (Soeprapto, 2010) Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas organisasi adalah dengan adanya peningkatan kemampuan organisasi yang dapat diukur melalui indikator responsive yaitu keselarasan antara program organisasi dan kegiatan 15 pelayanan seperti prosedur, aturan kerja, rencana umum dan kebutuhan aspirasi publik. Terdapat 3 elemen penting untuk mengukur kapasitas sebagai berikut:

- a) Policy (*capacity*), yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b) Implementation (*authority*), yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat

- c) Operational (*efficiency*), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

3. Peningkatan Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem meliputi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Dalam mengembangkan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap kinerja optimal organisasi. Penerapan kapasitas sistem yang dapat dilakukan adalah melalui perubahan kebijakan dan regulasi serta reformasi konstitusi. Dalam pengembangan kapasitas sistem dimana seluruh komponen organisasi dan individu masuk didalamnya. Tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumberdaya manusia lainnya. Adapun tujuan dari pengembangan kapasitas sistem dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum diidentikkan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan pada suatu sistem
- 2) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang dapat dilihat dari aspek berikut:
 - a) Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai outcome atau dampaknya.
 - b) Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
 - c) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan tujuan tersebut
 - d) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, organisasi dan sistem.

Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitasnya, dalam konteks sebuah pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar *good governance* itu sendiri, yaitu:

1. Masyarakat, dapat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subjek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri.
2. Pemerintah, karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur dalam pemerintahan dan juga sistem pemerintah.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Massa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji. Jumlah anggota BPD, paling sedikit 5 orang, dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Keanggotaan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terdiri atas 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan karena ada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis

pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui, musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan : Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa yang tertulis dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang bersal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembati antara masyarakat dengan pemerintahan desa minimal dengan adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan kolektif di desa dan apabila tidak dijembati maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa agar nantinya setiap keputusan - keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing – masing unsur pemerintahan desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Bdan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

2.3.1 Tugas Badan Permusyawatan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal – hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke desa pembentukan BUM Desa, Aset Desa, dan kejadian luar biasa.
- b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang diikuti oleh unsur masyarakat desa.
- c. Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun dari kepala desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa.
- d. Memberikan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan.

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/ walikota.
- g. Menggali, menampung , menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- h. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 55 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.3.3 Hak dan Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 61 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.4 Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 63 Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Bermusyawaratan desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa,
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan,
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

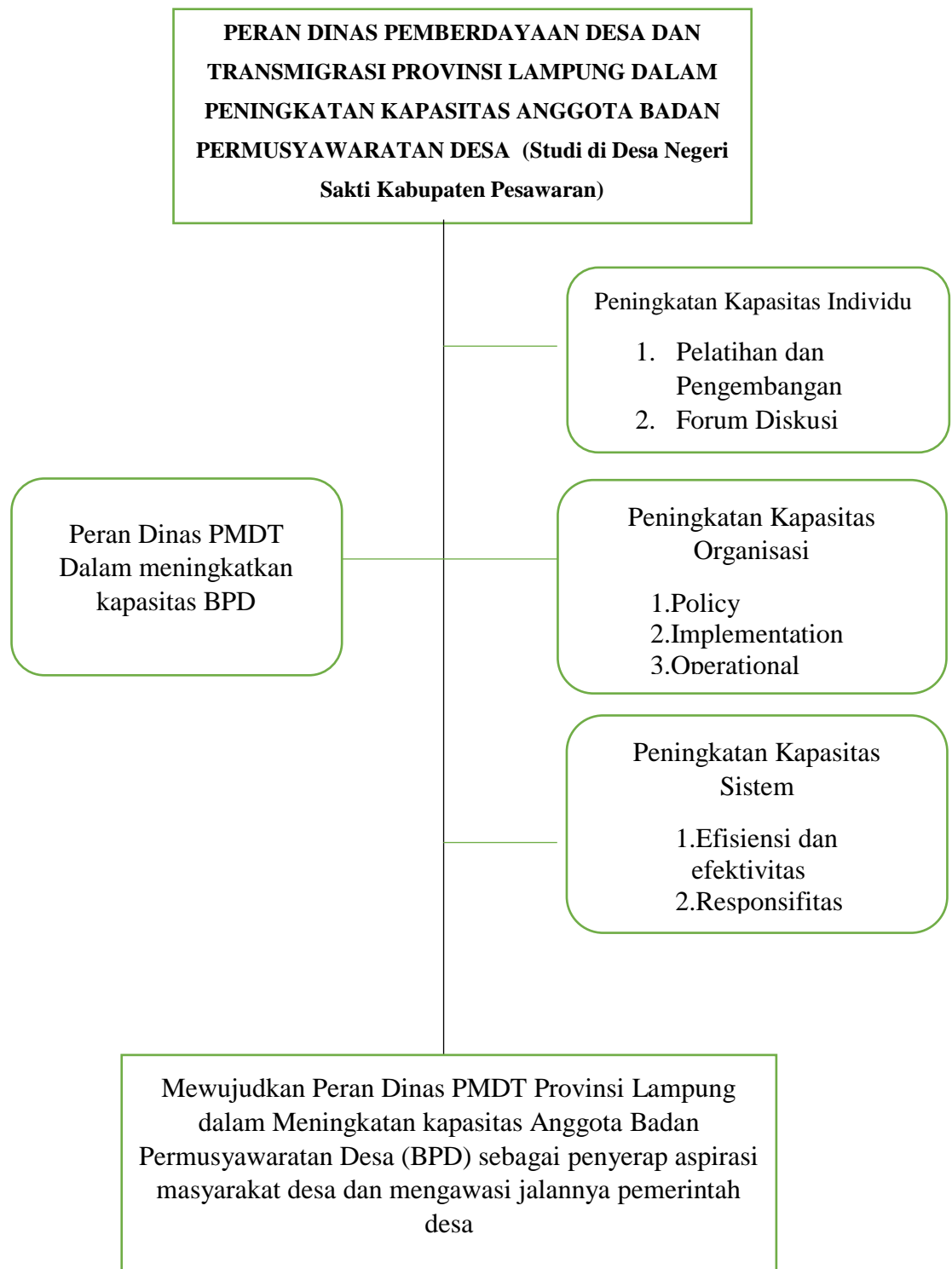
2.4 Kerangka Berpikir

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja kepala desa dalam pengawasan ataupun sebagai pendamping desa perlu adanya untuk di tingkatkan kapasitasnya. Berdasarkan uraian peningkatan kapasitas di atas termasuk peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam meningkatkan kapasitas dan pengembangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar kemampuan-kemampuan khusus BPD yang belum maksimal dapat di optimalkan lagi dan Dinas PMDT Provinsi Lampung juga harus ikut berperan membantu memberikan pelatihan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas yang di perlukan kerja sama dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para anggotanya. Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan, Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan indikator, ukuran peranan sangat di perlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Dalam peningkatan kapasitas terbagi dalam 3 tingkatan

(Soeprapto,2010) dalam (Sri Hartina Alwi,2019) yaitu 1) Tingkatan Individu terkhusus sebagai mitra desa apakah sudah melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan skill kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2) Tingkatan Organisasi terkhusus pada peran dan tugas atau fungsi BPD serta kerjasama sama antar lembaga dalam meningkatkan kemampuan anggota nya dan meningkatkan kapasitasnya. 3) Tingkatan Sistem perlu adanya aturan formal dalam sebuah sistem kerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut :



(Sumber : Diolah Oleh Penulis)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. (Menurut Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam Tentang (Peran Dinas Pemberdayaan Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman dan pemberian arti dari informan peneliti tentang Peningkatan Kapasitas BPD. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambar secara holistik. Berikut adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Studi Kasus, yaitu dalam meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam

untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.

2. Fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian.
3. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan indikator ataupun ukuran peranan sangat di perlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan dan untuk peningkatan

kapasitas yaitu merupakan sebuah aspek dalam meningkatkan kinerja aparatur dan peningkatan kapasitas merupakan suatu proses dalam meningkatkan kemampuan yang di miliki individu, organisasi dan sistem yang bertujuan untuk menganalisis lingkungannya (Soeprapto, 2010) dalam (Sri Hartina Alwi, 2019)

1. Peningkatan Kapasitas Individu

Kapasitas individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Pengembangan kapasitas individu secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai 12 macam metode, baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi.

2. Peningkatan Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi meliputi sumber daya, ketata laksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Pengembangan kapasitas organisasi secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan jaringan organisasi. Dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam pengembangan kapasitas meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan serta jaringan organisasi yang ada. Strategi penerapan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat dilakukan adalah melalui penataan struktur organisasi pemerintah yang tepat melalui spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintah, membenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja.

3. Peningkatan Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem meliputi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Dalam mengembangkan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama

adalah perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap kinerja optimal organisasi. Tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumberdaya manusia lainnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian, lokasi menjadi sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai “ Peran Dinas Pemberdayaan Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ini di dasarkan pertimbangan bahwa terkait pembahasan tentang Badan Permusyawaratan desa yang masih kurang adanya peningkatan kapasitas dalam kemampuan khusus tertentu setiap anggotanya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang sebenarnya dilapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara.
3. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi

dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif informan adalah suatu narasumber yang dapat memberikan informasi sangat penting, dalam menentukan informan yang akan peneliti gunakan untuk penelitian yaitu di tentukan dengan teknik sampling purposive sampling.

Pada penelitian ini teknik sampling yang di gunakan yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan teknik yang dapat di ambil yaitu *purposive sampling*. Alasan dalam pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling yaitu karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan. Jenis sampel pada sampel homogen ini berfokus pada satu kelompok tertentu atau kelompok yang sama (homogen) dan karakteristiknya di pilih karena adanya kesamaan pada pekerjaan dan lainnya.

Oleh karena itu sampel yang di pilih sengaja di tentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nama Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Yohanes Sulistiono,SE,MM NIP 19790203 200502 1 002	Kasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas PMDT Provinsi Lampung
2	Muhammad Aziz Satriya Jaya,SE.,M.Si NIP 19780203 200501 1004	Kasi Pengembangan dan Peningkatan Dinas PMDT Provinsi Lampung

3	Ersali	Ketua BPD
4	Agus Susilo	Wakil Ketua BPD
5	Dedi Setiawan	Sekretaris BPD
6	Subhan	Anggota
7	Rojali	Anggota
8	Yeni Fitriani	Anggota
9	Erdha Kholik	Anggota
10	Adriansyah	Anggota
11	M. Ridwan	Anggota

Sumber : Data diolah oleh peneliti pada tahun 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode – metode sebagai dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ada 3 cara yaitu :

1. Metode wawancara (interview)

Menurut Sugiyono (2018: 138-140) dalam (Irwansyah, Dodi, Handayani, & Johaidahn 2021) Wawancara dapat di lakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muk (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya dan jika melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan rekaman. Guba dan Licoln (Lexy J. Maleong,2002) dalam Sulaiman, S.(2018) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang telah dilakukan secara sengaja, sistematis yang mengenai fenomena sosial. Sutrisno Hadi (1986) dalam Rahman, T. (2021) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi di gunakan apabila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala –gejala alam.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin kesuksesan hasil penelitian serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat di tampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan

data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006:247). Data yang disajikan berdasarkan fakta – fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas Peran Dinas Pemberdayaan Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Yang terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi

2. Penyajian Data

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*), dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung berdiri sejak Tahun 1970 dan telah mengalami banyak perubahan secara nomenklatur dari awal berdirinya hingga sekarang. Tahun 1970 awal berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung memiliki nama Bantuan Pembangunan Desa (BANGDES), kemudian pada Tahun 2000 berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun 2001 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan peraturan dan berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara nomenklatur sejak Tahun 2007 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung. Pada tahun 2008 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung sampai sekarang.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2009, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya guna efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur desa atau kelurahan serta pemberdayaan dan kelembagaan desa atau kelurahan, adat sosial masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah desa dan daerah tertinggal.
- d. proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan dalam membangun desa atau kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1. Visi

Lampung Maju dan Sejahtera 2019. Maksud dari visi tersebut yaitu mampu mewujudkan masyarakat Lampung yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Maju dalam arti mencakup kemajuan perekonomian, pendidikan, teknologi, politik dan hukum. Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif dan produktif, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

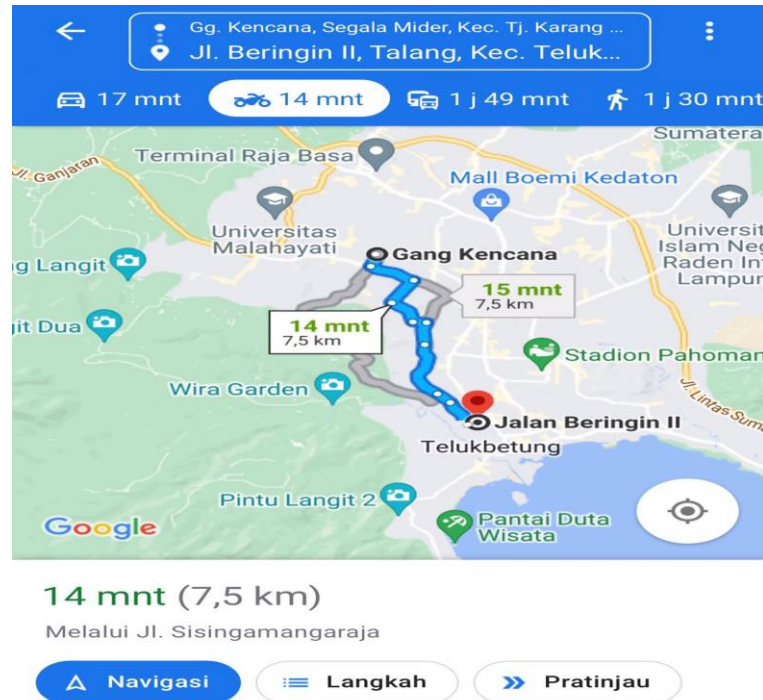
2. Misi

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

4.1.3 Alamat Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Lampung

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Beringin II Talang No. 39 Teluk Betung, Bandar Lampung. Jarak tempuh dari Alamat Peneliti ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang lebih 7,5 km. Denah lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Peta Lokasi Dinas PMD Provinsi Lampung

Sumber : Google Maps (2022)

4.1.4 Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung

Sumber daya Organisasi DPMDT Provinsi Lampung merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) *power* artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung.

Dinas PMDT Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga keberhasilan bisa dicapai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Kendaraan roda 2	2 unit
3.	Kendaraan roda 4	2 unit
4.	Komputer	20 unit
5.	Komputer jaringan	1 unit
6.	AC Split	23 unit
7.	Lemari arsip	32 buah
8.	Filing cabinet	30 buah
9.	Brankas	9 buah
10.	Kursi sandaran pendek	3 buah
11.	Lemari kayu	5 unit
12.	Rak kayu	3 unit
13.	Meja rapat	11 buah
14.	Meja kerja ess II	1 buah
15.	Meja kerja ess III	5 buah
16.	Meja kerja ess IV	11 buah
17.	Kursi kerja ess II	1 buah
18.	Kursi kerja ess III	5 buah
19.	Kursi kerja ess IV	11 buah
20.	Kursi rapat	55 buah
21.	Kursi putar sandaran tinggi	6 buah
22.	Kursi lipat stainless	40 buah
23.	Meja ½ biro kayu	50 buah
24.	Kursi tamu/size	8 unit
25.	Buffet kaca	2 buah
26.	Mesin tik manual	8 buah
27.	Faximile	1 unit
28.	LCD	6 unit

29.	OHP	2 unit
30.	Intercom unit	10 buah
31.	Sound system	2 unit
32.	Computer note book	16 unit
33.	Handycam	3 unit
34.	Kamera	7 unit
35.	TV	11 unit
36.	Vacum cleaner	2 buah
37.	Wireless	2 buah
38.	Mesin potong rumput	1 buah
39.	Alat pemadam kebakaran	2 buah
40.	Gordyn	3 paket
41.	Kanopy/awning	2 unit

(Sumber : Rensra Dinas PMDT 2020)

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Dinas PMDT Provinsi Lampung hingga Tahun 2019 ini melibatkan personil berjumlah 83 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 74 orang, PTHL 9 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2019

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
PNS : 72	S3 : -	IV/d : 0		
PTHL : 9	S2 : 26	IV/c : 2	Ess IV =	

			15	
L : 36	S1 : 25	IV/b : 6	Ess III = 5	
P : 45	D4 : -	IV/a : 5	Ess II = 1	
	D3 : 5	III/d : 17		
	D2 : -	III/c : 11		
	D1 : -	III/b : 10		
	SLTA : 23	III/a : 9		
	SLTP : -	II/d : 1		
	SD : 2	II/c : 10		
		II/b : 0		
		II/a : 1		
		I/d : -		

(Sumber : Rensra Dinas PMDT 2020)

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas PMDT Provinsi Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung Berdasarkan Eselonisasi

PERANGKAT DPMDT	ESELONISASI						JML
	I B	II A	II B	III A	III B	IV A	
1 Sekretariat	-	1	-	1	-	-	2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	1	1

PERANGKAT DPMDT	ESELONISASI						JML
	I B	II A	II B	III A	III B	IV A	
Sub Bagian Perencanaan	-	-	-	-	-	1	1
2 Bidang Desa dan Kelurahan	-	-	-	1	-	-	1
Sub Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	1	1
Sub.Bidang Pengembangan dan Kapasitas	-	-	-	-	-	1	1
3 Bidang Kelembagaan Sosial Budaya, Masyarakat	-	-	-	1	-	-	1
Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya masyarakat	-	-	-	-	-	1	1
4 Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat	-	-	-	1	-	-	1
Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	1	1
Sub. Bidang Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	1	1
5 Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	1	-	-	1
Sub Bidang Pengembangan SDA	-	-	-	-	-	1	1

PERANGKAT DPMDT	ESELONISASI						JML
	I B	II A	II B	III A	III B	IV A	
dan Lingkungan Hidup							
Sub Bidang Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	1	1
Sub Bidang Promosi dan dan Inovasi TTG	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH ESELON	-	1	-	5	-	15	21

(Sumber : Rensra Dinas PMDT 2020)

4.2 Gambaran Umum Desa Negeri Sakti

4.2.1 Sejarah Desa Negeri Sakti

Desa Negeri Sakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki luas wilayah 400 Ha. Desa tersebut terletak disebelah timur Gedong Tataan yang merupakan ibukota kecamatan. Seluruh jalan desa merupakan jalan beraspal yang sangat mendukung kelancaran akses hubungan Desa Negeri Sakti dengan ibukota kecamatan dengan jarak 10 km yang dihubungkan oleh aspal sehingga memungkinkan hubungan Desa Negeri Sakti dengan ibukota kecamatan berjalan baik dan lancar. Dilihat dari jangkauan (orbitasi), maka dapat disimpulkan jarak antara desa dan ibukota 10 km, kemudian jarak antara desa dan kabupaten 30 km kemudian jarak antara desa dan ibukota provinsi 15 km dan jarak desa dengan pelabuhan Janti 15 km.

Kondisi geografis Desa Negeri Sakti yaitu terletak pada ketinggian 300 m diatas permukaan laut (mdpl), memiliki intensitas curah hujan 200-300 mm dan suhu udara rata-rata 20 derajat Celcius.

4.2.2 DATA UMUM

1. Tipologi Desa / Kelurahan :
2. Klasifikasi Desa / Kelurahan :
Swakarya
3. Kategori desa / Kelurahan :
Berkembang
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam
:Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi :Padi,
Jagung, Singkong, Kakao, Kelapa
6. Luas Wilayah
 - a. Panjang jalan : 20 Km
 - b. Pertanian Padi : 50 Ha
 - c. Ladang : 35 Ha
 - d. Empang : 5 Ha
 - e. Pemukiman : 88 Ha
 - f. Perkuburan/makam : 30 Ha
 - g. Lain-Lain : 1.027,54 Ha
7. Jumlah Sertifikat Tanah / Luas Tanah: 3.499 Buah /1.327,04Ha
8. Jumlah Tanah Kas Desa :
9. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah) :
 - a. Jarak dari Pemerintah Kecamatan :12 Km
 - b. Jarak dari Pemerintahan Kota/ Kabupaten :16 Km
 - c. Jarak dari Ibukota /Ibukota Kabupaten :16 Km
 - d. Jarak ndari Ibukota Propinsi :16 Km
10. Jumlah kepala Keluarga :
 - a. Keluarga Pra sejahtera : 260
 - b. Kelaurga Sejahtera I :
 - c. Keluarga Sejahtera II :
 - d. Keluarga Sejahtera III :
 - e. Keluarga Sejahtera III plus :
11. Jumlah Penduduk : 5.713 Jiwa

a.	Laki laki	: 2.940 Jiwa
b.	Perempuan	: 2.773 Jiwa
c.	Usia 0-17	: 1.609 Jiwa
d.	Usia 18 – 56	: 3.546 Jiwa
e.	Usia 56 Ke-atas	: 558 Jiwa

12. Pekerja / Mata Pencaharian

a.	Karyawan	: 495
	- Pegawai Negeri Sipil	: 145
	- TNI / Polri	: 35
	- Dokter Swasta	: 3
	- Karyawan Swasta	: 318
b.	Wiraswasta / Pedagang	: 31
c.	Petani	: 400
d.	Buruh Tani	: 350
e.	Nelayan	: -
f.	Peternak	: 45
g.	Pengerajin Industri RT	: 40
h.	Montir	: 9
i.	Bidan Swasta	: 4
j.	Perawat Swasta	: 7
k.	Pembantu Rumah Tangga	: 35
l.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	: 24
m.	Pengusaha Kecil Menengah	: 7
n.	Notaris	: 1
o.	Dosen Swasta	: 2

13. Rasio Pendidikan dan Kesehatan

a.	Rasio Murid dan Guru	
	- Taman Kanak-kanak	: 40
	- Sekolah Dasar / Sederajat	: 356
	- SMP / Sederajat	: 157
	- SMA / Sederajat	: 124
	- Akademi	: 40

- Sarjana	: 32
- Pasca Sarjana	: 8
b. Rasio Penduduk dan Tenaga Kesehatan	
- Dokter Umum	: 2
- Dokter Spesialis	: -
- Bidan / Dukun Bayi Terlatih	: 8
- Mantri Kesehatan	: 3
- Perawat	:16
14. Tingkat Pendidikan Masyarakat	
a. Lulusan Pendidikan Umum	
- Taman Kanak-kanak	: 32
- Sekolah Dasar / Sederajat	: 832
- SMP / Sederajat	: 1196
- SMA / Sederajat	: 1756
- Akedemi / D1-D3	: 359
- Sarjana S 1	: 178
- Sarjana S 2	: 7
- Sarjana S 3	: -
b. Lulusan Pendidikan Khusus	
- Pondok Pesantren	: 25
- Pendidikan Keagamaan	: 62
- Sekolah Luar Biasa	: 5
- Kursus Keterampilan	:
c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	
- Tidak Lulus	:
- Tidak Sekolah	:
15. Sarana dan Prasarana	
a. Kantor Desa	: 1
b. Prasarana Kesehatan	
- Puskesmas	: -
- Puskesmas Pembantu	: 1
- Poskesdes	: -

- Posyandu dan Polindes : 8
- c. Prasarana Pendidikan
 - Perpustakaan Desa : -
 - Gedung Sekolah PAUD : 3
 - Gedung Sekolah TK : 3
 - Gedung Sekolah SD : 4
 - Gedung Sekolah SMP : 2
 - Gedung Sekolah SMA : 2
 - Gedung Perguruan Tinggi : -
- d. Prasarana Ibadah
 - Masjid : 9
 - Mushola : 5
 - Gereja : -
 - Pura : -
 - Vihara : -
 - Klenteng : -
- e. Prasarana Umum
 - Olahraga : 1
 - Kesenian/budaya : -
 - Balai Pertemuan : 1
 - Sumur Desa : -
 - Pasar Desa : -
 - Lainnya : -
- f. Prasarana Trnsportasi
 - Jalan Desa (*Aspal/Beton*) : Aspal
 - Jalan Kabupaten (*Aspal/Beton*) : Aspal
 - Jalan Propinsi (*Aspal/Beton*) : Aspal
 - Tambatan Perahu : -
 - Perahu Motor : -
 - Lapangan Terbang : -
 - Jembatan Besi : -

g. Prasarana Air Bersih

- Hidran Umum : Tidak Ada
- Penampungan Air Hujan : Tidak Ada
- PAMSIMAS : Ada
- Pengolahan Air Bersih : Tidak Ada
- Sumur Gali : Ada
- Sumur Pompa : Tidak Ada
- Tangki Air Bersih : Tidak Ada

h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

- MCK Umum : Tidak Ada
- Jamban Keluarga : Ada
- Saluran Draenase : Tidak Ada
- Pintu Air : Tidak Ada
- Saluran Irigasi : Tidak Ada

4.2.3 KELEMBAGAAN

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain

- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Jumlah Anggota : 8 Orang
- Jumlah Kegiatan per bulan :
- Jumlah dana yang dikelola : Rp

2. Lembaga Adat

- Pemangku Adat :
- Kepengurusan Adat :
- Simbol Adat :
- Kegiatan Adat :

3. TP PKK

- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Jumlah Anggota : 37 Orang
- Jumlah Kegiatan per bulan : 8 Kegiatan
- Jumlah buku administrasi yang dikelola :
- Jumlah dana yang dikelola : Rp

4. BUMDes

- Jumlah /Jenis BUMDes : Buah/....

- Jumlah Modal Dasar BUMDes :Rp. 150.000.000,-
 - Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes : Rp
5. Karang Taruna
- Jenis Kegiatan :
 - Jumlah Pengurus :
 - Jumlah Anggota :
6. RT / RW
- Jumlah RW : 8
 - Jumlah RT : 24
 - Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan :
 - Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan :
7. Lembaga Kemasyarakatan lainnya :

4.2.4 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Jumlah Anggota Linmas : 16
Orang
2. Jumlah Pos Kamling : 12
buah
3. Jumlah Operasi Penerbitan :
4. Jumlah Kejadian Kriminal
 - a. Pencurian dan Perampokan :
 - b. Perkosaan :
 - c. Pembunuhan :
 - d. Penipuan :
 - e. Perkelahian Masal :

4.2.5 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

POTENSI UMUM

Tabel 6. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Sukabanjar	GEDONG TATAAN
Sebelah Selatan	Desa Sungai Langka	GEDONG TATAAN
Sebelah Timur	Desa Kurungan Nyawa	GEDONG TATAAN
Sebelah Barat	Desa Bernung	GEDONG TATAAN

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

Tabel 7. Jumlah Penduduk

a. Jumlah laki-laki	2940 orang
b. Jumlah perempuan	2773 orang
c. Jumlah total (a+b)	5713 orang
d. Jumlah kepala keluarga	1553 KK
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	per km

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

Tabel 8. Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
	(Orang)	(Orang)		(Orang)	(Orang)
0-12 bulan	4	4	39 tahun	61	43
1 tahun	22	14	40	43	53
2	18	12	41	46	46
3	31	22	42	50	56
4	44	29	43	34	47
5	43	36	44	36	47
6	62	45	45	37	32
7	52	75	46	50	45
8	57	56	47	37	35
9	55	66	48	45	35
10	60	58	49	45	35
11	49	59	50	36	35
12	62	52	51	33	36
13	57	56	52	19	26
14	59	49	53	23	26
15	50	39	54	36	35
16	63	45	55	28	27
17	54	50	56	21	32
18	64	47	57	15	15
19	60	47	58	19	18
20	47	43	59	27	22
21	58	36	60	25	15
22	49	48	61	2	12
23	59	36	62	15	13
24	51	53	63	15	16
25	36	50	64	11	14
26	39	63	65	14	15
27	45	63	66	10	9
28	48	61	67	8	6
29	56	54	68	12	12

30	51	48	69	11	14
31	82	56	70	12	9
32	51	47	71	2	2
33	59	54	72	8	5
34	56	51	73	6	9
35	68	51	74	5	8
36	41	41	75	5	8
37	58	59	Diatas 75	41	33
38	54	35	Total	2940	2773

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

Tabel 9. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	119	81
2. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	15	25
3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	19	25
4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	347	289
5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	4	5
6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	21	35
7. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	60	73
8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	121	146
9. Tamat SD/ sederajat	432	400
10. Tamat SMP/ sederajat	600	596
11. Tamat SMA/ sederajat	901	855
12. Tamat D-1/ sederajat	69	79
13. Tamat D-2/ sederajat	75	32
14. Tamat D-3/ sederajat	63	41
15. Tamat S-1/ sederajat	89	89
16. Tamat S-2/ sederajat	5	2
17. Tamat S-3/ sederajat	0	0
18. Tamat SLB A	0	0
19. Tamat SLB B	0	0
20. Tamat SLB C	0	0
Jumlah	2940	2773
Jumlah Total		5713

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

Tabel 10. Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	300	100
2. Buruh tani	300	50
3. Buruh migran perempuan	0	0
4. Buruh migran laki-laki	0	0
5. Pegawai Negeri Sipil	80	65
6. Pengrajin industri rumah tangga	25	15
7. Pedagang keliling	25	6
8. Peternak	45	0
9. Dokter swasta	1	2
10. Bidan swasta	0	4
11. Pensiunan TNI/POLRI	35	1
12.		
13.		
Jumlah		
Jumlah Total Penduduk		

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

**Tabel 11. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan
Desa/BPD**

Gedung Kantor	Belum Ada
Ruangan Kerja	Belum Ada
Balai BPD	Belum Ada
Kondisi	
Listrik	Belum Ada
Air bersih	Belum Ada
Telepon	Belum Ada
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Jumlah mesin tik	Belum Ada
Jumlah meja	Belum Ada
Jumlah kursi	Belum Ada
Jumlah almari arsip	Buah
Komputer	Unit
Mesin fax	Unit

Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	Ada / Tidak
Buku administrasi kegiatan BPD	Jenis
Buku kegiatan BPD	Ada / Tidak
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Ada / Tidak

(Sumber : Desa Negeri Sakti)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Desa Negri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran) , maka dapat di simpulkan.

1. Peningkatan Kapasitas Individu Peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan peran BPD dalam sebuah pelatihan dan pengembangan serta sebuah forum diskusi dapat di katakan masih kurang berperan secara maksimal karena 2 indikator yang di jalankan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung hanya di lakukan terakhir di tahun 2019 sehingga untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD masih di katakan kurang berperan.
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan peran BPD pada sebuah aturan atau kebijakan telah di jalankan dengan baik agar nantinya dapat di implementasikan oleh anggota BPD di lapangan dan aturan-aturan itu untuk mewujudkan pelayanan umum yang baik sehingga dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD dapat dikatakan telah berperan.
3. Peningkatan Kapasitas Sistem Peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan peran BPD pada sebuah aturan yang dapat di laksanakan di lapangan untuk memenuhi kebutuhan BPD dan sebuah aturan untuk mendukung dalam pengelolaan efisiensi/efektifitas sistem organisasi yang ada di BPD dan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD masih di katakan kurang maksimal karena aturan yang telah di

berikan jika di implementasikan di lapangan masih banyak masalah dan kendala yang terjadi sehingga peningkatkan kapasitas anggota BPD dapat dikatakan masih kurang berperan.

6.2 Saran

1. Dinas PMDT di harapkan lebih banyak memberi kegiatan pelatihan, pengembangan kepada BPD agar peningkatan kapasitas anggota BPD dapat lebih baik lagi dan juga memperbanyak forum diskusi untuk meningkatkan kapasitas dari BPD karena masih banyak BPD yang belum paham terkait fungsi dan tugas nya.
2. Dinas PMDT harus dapat lebih meningkatkan lagi bentuk sebuah pelayanan untuk para anggota BPD agar nantinya anggota BPD dapat mengimplementasikan ke masyarakat dalam wujud sebuah pelayanan umum yang baik bagi masyarakat dan sebuah aturan untuk membangun kemampuan para anggota BPD.
3. Dinas PMDT harus dapat lebih meningkatkan kepekaan dalam melakukan sebuah peran untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD seperti halnya sebuah aturan yang masih banyak kendala dan masalah di lapangan dan seperti aturan yang masih belum sinkron antara kebutuhan BPD sehingga Peran Dinas PMDT Provinsi Lampung yaitu harus mengevaluasi kembali kendala yang menghambat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Drucker, Peter F. Inovasi dan Kewiraswastaan: Praktek & Dasar-Dasar, Jakarta:Erlangga, 1985.
- Singarimbun, M dan Effendi S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Brown. 2001. *Peningkatan Kapasitas dalam Kelembagaan*. Vol. 1 No. 3 Hal. 10-13.
- Tarance Morrison, 2001. *Actionable learning- A Handbook For Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Remaja, hal 11
- Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- JICA. 2004. *Laporan Akhir Studi Penguatan Kapasitas Klaster UKM di Republik Indonesia*. Jakarta: KRI International Corp.
- Dwiyanto Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Dendy, Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendiknas*.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Soekanto, Soejono . 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Miftah Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya* . Jakarta: Rajawali Pers

Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*: PT.Bumi Aksara, Jakarta

Miftah Thoha.2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soejono, 2013 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta

Dwi Narwako, J., dan Suyanto,Bagong., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana. 2013.

Sondang P. Siagian. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Skripsi :

Alwi, Sri Hartina. 2019. *Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Takalar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dwiranti, lilis 2020.*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Web :

Adi S. 2003. *Pengertian Peningkatan Menurut ahli*.<http://www.Duniapelajar.com.pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli.Html>.

Jurnal :

Soeprapto H. R. 2010 *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. UPI : Jurnal Fakultas Ilmu Politik Dan Sosial.

Undang-undang :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa